



BADAN KEAHLIAN
DPR RI
Building research to implement
Evidence-based policy-making

ANALISIS PAGU INDIKATIF MAHKAMAH KONSTITUSI



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

Tio Riyono S.E., Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Fachry Ali Firdaus, S.E.

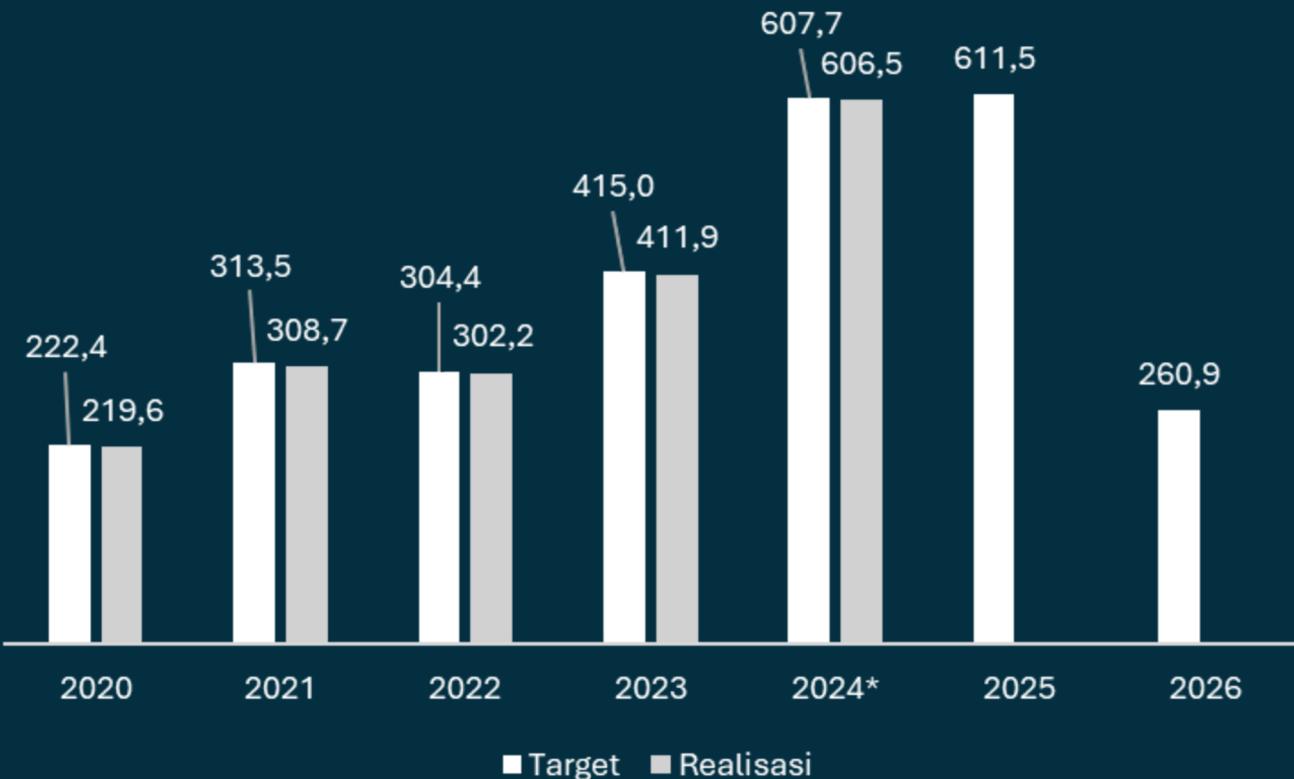
JUNI 2025

Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
MK dalam RPJMN 2025-2029	06
Belum Optimalnya Dukungan Sistem Informasi MK guna menunjang kinerja	07



(miliar rupiah)



Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2024-2025, KEM PPKF 2026

*) *Outlook*

Pagu Indikatif 2026

PROGRAM	APBN 2025	PAGU INDIKATIF 2026	%
Dukungan Manajemen	194,9	135,8	
Penanganan Perkara Konstitusi	416,6	125,1	
TOTAL	611,5	260,9	-57,3

Pagu Indikatif Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2026 sebesar Rp260,9 miliar dengan rincian: 1) Program Dukungan Manajemen Rp135,8 miliar; 2) Program Penanganan Perkara Konstitusi Rp125,1 miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut **menurun 57,33 persen** dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp611,25 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.



Proporsi Terbesar Anggaran Dialokasikan pada Penanganan Perkara Konstitusi

Anggaran terbesar MK 2020-2023 dialokasikan untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 56,5 persen. Penanganan Perkara Konstitusi meningkat menjadi 73,1 persen (2024) dan 68,1 (2025). Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 menjadi penyebab tingginya alokasi anggaran penanganan perkara konstitusi. Kemudian menurun signifikan hingga menjadi 47,9 persen (2026).



Anggaran MK hampir selalu meningkat pada 2020-2025 namun menurun drastis pada 2026

Anggaran MK semula Rp222,4 miliar (2020) perlahan meningkat hingga pada 2025 mencapai Rp611,5 miliar. Kemudian pada 2026 MK mengalami penurunan tajam hingga 57,3 persen menjadi Rp260,9 miliar.



Penyerapan anggaran MK sangat tinggi

Pada periode 2020-2023, rata-rata penyerapan anggaran MK sebesar 98,9 persen. Tingginya tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta kemampuan MK dalam mengelola sumber daya secara optimal. Capaian tersebut juga menunjukkan komitmen MK dalam merealisasikan anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan target, yang penting untuk mendukung kelancaran fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung kegiatan penanganan perkara konstitusi dan penguatan kelembagaan lainnya.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4

Outcome	Output
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK (rekomendasi)
Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas	Penyusunan Anotasi Undang-Undang (undang-undang)
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi (orang)
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK (laporan)
Terwujudnya Budaya Integritas MK	Pembangunan Zona Integritas (laporan)
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi (orang)
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi (layanan)
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (orang)

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 5

Outcome	Output
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Workshop Penanganan Perkara PHPU (orang)
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus (perkara)
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (orang)
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi (laporan)
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Penyusunan Kebijakan Pengadaan Konstitusional (Constitutional Complaint) (rekomendasi kebijakan)
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Pengembangan ICT dan Sarana Persidangan sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan (unit)
Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Pembangunan e-learning (sistem informasi)

MK dalam RPJMN 2025-2029

PRIORITAS
NASIONAL (PN)

Asta Cita 1 (PN 01)
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Asta Cita 7 (PN 07)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan dua sasaran strategis untuk periode 2025-2029, yaitu peningkatan kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya, serta peningkatan kualitas putusan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan peran MK. Kedua sasaran ini secara langsung mendukung Prioritas Nasional (PN) yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, khususnya Asta Cita 1 (PN01) terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta Asta Cita 7 (PN07) yang menekankan reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Untuk menjawab tantangan strategis yang telah diidentifikasi, MK menyusun arah kebijakan dan strategi terencana guna menjamin bahwa pencapaian sasaran dilakukan secara sistematis dan terukur. Keterkaitan ini menegaskan bahwa program kerja MK bukan hanya selaras dengan mandat konstitusionalnya, tetapi juga turut memperkuat agenda pembangunan nasional.

→ **Belum Optimalnya Dukungan Sistem Informasi MK guna menunjang kinerja**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas manajemen pelayanan peradilan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2024, ditemukan bahwa MK belum sepenuhnya berhasil menyelenggarakan layanan peradilan yang efektif, efisien, tertib, dan tepat waktu. Permasalahan ini bukan hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga menunjukkan kelemahan sistemik dalam tata kelola internal, mulai dari aspek regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, hingga pengawasan mutu layanan.

Beberapa persoalan mendasar meliputi belum terintegrasinya sistem informasi perkara (SIMPEL, SIMPPK, dan e-Minute) secara menyeluruh, ketiadaan SOP yang komprehensif untuk seluruh tahapan pelayanan peradilan, serta keterlambatan dalam pengiriman salinan putusan kepada para pihak dan pemuatan putusan ke dalam Berita Negara. Selain itu, sarana persidangan jarak jauh yang disiapkan belum dimanfaatkan secara optimal, dan masih ada ketidaktertiban dalam pencatatan administrasi perkara.

Kondisi tersebut berdampak pada pencapaian sasaran strategis MK yang ingin mewujudkan layanan peradilan yang modern dan terpercaya. Jika tidak segera dibenahi, kelemahan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap MK dan menghambat fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi. BPK merekomendasikan agar MK segera memperbaiki sistem informasi secara terintegrasi, menyusun regulasi teknis yang memadai, melengkapi SOP, serta memperkuat pengawasan internal atas mutu layanan peradilan.

Output & Outcome Anggaran 2025



Follow Kami

 www.bkd.dpr.go.id

 [pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)